



2025

RENCANA KERJA (RENJA)

**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Natuna
Tahun 2024**

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025 dapat terselesaikan. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Beberapa hal yang diperlukan sebelum dilakukannya Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025 adalah :

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
2. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/ atau realisasi APBD.

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan penjabaran dari Renstra yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna, yang selanjutnya akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis dan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, dan target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna telah sesuai dengan tugas dan fungsinya.



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
 BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA TAHUN LALU	 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	14
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	16
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRASNSMIGRASI.....	 17
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	17
3.2. Tujuan dan Sasaran	21
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	 26
4.1. Program dan Kegiatan	26
 BAB V PENUTUP	 27

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna adalah mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya, mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, aset, dan barang persediaan, merumuskan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan hubungan industrial, membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup dinas, mengkoordinasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkupnya.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan hubungan industrial;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan hubungan industrial;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan hubungan industrial;
- d. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan hubungan industrial;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan gambaran tentang program dan kegiatan

yang akan dikerjakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam satu tahun anggaran sekaligus menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Badan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna diawali dengan persiapan penyusunan renja, dilanjutkan dengan Penyusunan Rancangan Renja, Forum SKPD, dan Penetapan Renja melalui Peraturan Bupati Kabupaten Natuna.

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Persiapan Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencakup :

- 1) Penyusunan rancangan Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang pembentukan tim penyusun Renja;
- 2) Orientasi mengenai Renja;
- 3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja; dan
- 4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Aktivitas dalam penyusunan Rancangan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah meliputi :

- 1) Perumusan Rancangan Renja, dan
- 2) Penyajian Rancangan Renja.

Perumusan rancangan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencakup :

- a) Pengolahan data dan informasi;
- b) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu berdasarkan Renstra;
- c) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- d) Telaahan terhadap rancangan awal Renja;
- e) Perumusan tujuan dan sasaran;
- f) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- g) Perumusan kegiatan prioritas;
- h) Penyajian awal dokumen rancangan Renja;
- i) Penyempurnaan rancangan Renja;
- j) Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan
- k) Penyesuaian dokumen rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

3. Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan. Dalam Forum Perangkat Daerah ini rancangan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibahas, sehingga diperoleh masukan perbaikan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

4. Penetapan Renja SKPD

Pada tahap ini, rancangan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah disempurnakan dan sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki keterkaitan dengan dokumen RKPD Kabupaten Natuna, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Renja Kementerian/Lembaga. Penyusunan Renja mengacu pada Rancangan Awal RKPD, dan memperhatikan dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2021-2026 serta Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2019-2024. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan RKA dan DPA.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan, Kabupaten Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

-
- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021--2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 19);
16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Serita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 274);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna tahun 2025 sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ke dalam rencana tahunan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Tujuan

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ke dalam program dan kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program dan kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun 2025;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna tahun 2025 sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan;
 memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan;
- Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 memuat evaluasi pelaksanaan Renja, analisis kinerja, isu-isu penyelenggaraan tugas dan Fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan telaah usulan program dan kegiatan;
- Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 memuat telaah visi misi dan program kepala daerah, telaah renja Kementerian dan Provinsi, penetapan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran strategis;
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 memuat program dan kegiatan serta pagu anggaran; dan
- Bab V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA TAHUN LALU

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna berjalan dengan baik. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp. 7.175.584.769,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.187.587.808,00 atau sebesar 86,23%.

Berikut ini diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2023 dan capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna.

1. Daftar program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
- I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - I.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - I.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - I.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - I.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - I.3.1 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - I.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - I.3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - I.3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - I.3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - I.3.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - I.3.5 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - I.3.6 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - I.3.7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - I.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - I.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - I.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - I.4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- I.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - I.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - I.5.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - I.5.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- II. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - I. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
 - I.1 Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
- III. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - I. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - I.1 Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
 - II. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - II.1 Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja
- V. Program Hubungan Industrial
 - I. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
- VI. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
 - I. Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
 - I.1 Sub Kegiatan Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
- VII. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
 - I. Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
 - I.1 Sub Kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman

2. Dari semua program/kegiatan yang ada terdapat satu program yang masih belum tercapai kinerja nya yaitu program penempatan tenaga kerja, hal ini terjadi karena pencari kerja yang terdaftar AK1 yang bekerja atau ditempatkan sedikit .
3. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan yaitu sebagai berikut:
 - a. Komitmen dan kerjasama dari pimpinan unit, pelaksana kegiatan, pejabat pengadaan barang dan jasa sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan waktu yang telah ditetapkan.
 - b. Dukungan Perangkat Daerah terkait dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau.
4. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja/hasil pada program penempatan tenaga kerja yaitu pencari kerja yang mendaftar AK1 tidak melaporkan apakah mereka ditempatkan atau belum padahal sudah diingatkan oleh petugas dinas untuk melaporkan kepada dinas .
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten Natuna. Capaian renstra secara umum telah berjalan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa perbaikan kedepannya.

6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil pada penyusunan Renja tahun 2023 yaitu perlu dilakukan sinkronisasi kegiatan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung capaian target kinerja.

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna s/d Tahun 2021 terlihat pada Tabel 2.1

Tabel

2.1

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Tahun 2022 s.d 2023**

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025

Lampiran:

EVALUASI RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA PERIODE PELAKSANAAN TAHUNAN II TAHUN 2023

Kode	Satuan II	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Saluran	Target Rencana PO pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode rencana PO)		Realisasi capaian Kinerja Rencana PO sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang direvisi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PO yang direvisi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PO yang direvisi	Realisasi Kinerja Rencana PO s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Rencana PO s/d Tahun 2023	Perangkat Daerah				
					K	RP	K	RP	K	RP Renja	K	RP DIPA	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP						K	RP	K	RP
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					K	RP	K	RP	K	RP Renja	K	RP DIPA	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
01.01.		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				35.074.230.000		5.340.592.149		6.524.886.000		7.175.584.769		1.121.372.276		1.551.400.403		1.063.053.396		2.451.761.733		6.187.587.008				11.528.179.957		32,87	
2.07.01.		PROGRAM PEMBERIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAPORAN LKIP	Nilai LAPORAN LKIP	81,92	400.000.000	81,65	21.226.483	81,88	80.000.000	81,89	34.105.810	0	903.606	0	1.307.645	71,05	2.652.545	0	4.608.460	71,05	9.472.256	99,18	27,77	152,70	30.608.739	186	7,67	
2.07.01.2.01.		Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	400.000.000	100	21.226.483	100	80.000.000	100	34.105.810	0	903.606	0	1.307.645	99,18	2.652.545	0	4.608.460	99,18	9.472.256	99,18	27,77	99,18	30.608.739	99,18	7,67	
2.07.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	12	200.000.000	2	21.226.483	2	40.000.000	2	34.105.810	2	903.606	0	1.307.645	0	2.652.545	0	4.608.460	2	9.472.256	100	27,77	2	30.608.739	17	15,75	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.		PROGRAM PEMBERIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Hubungan Administrasi Kesekretariatan yang Sesuai SOP	Persentase	98	26.941.874.000	80	4.865.128.360	85	5.261.529.980	85	5.855.687.250	85	1.090.444.405	85	1.475.904.396	85	981.385.342	85	1.697.312.878	85	5.244.967.021	100	89,57	165	18.110.095.381	183	37,53	
2.07.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pelaksanaan Administrasi Keuangan	Ketepatan Waktu	1	23.123.150.000	1	4.042.176.956	1	4.600.030.000	1	4.326.845.969	1	936.105.924	1	1.242.093.601	1	718.399.041	1	1.348.283.591	1	4.244.882.157	100	98,11	2	8.287.059.113	200	35,84	
2.07.01.2.03.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	33	23.123.150.000	31	4.042.176.956	31	4.600.030.000	31	4.326.845.969	31	936.105.924	31	1.242.093.601	31	718.399.041	31	1.348.283.591	31	4.244.882.157	100,00	98,11	31	8.287.059.113	94	25,84	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	95	80.000.000	0	-	95	30.000.000	95	39.474.380	0	825.304	50	9.672.956	70	19.160.770	70	1.650.608	70	31.309.638	73,68	79,32	70	31.309.638	74	39,14	
2.07.01.2.05.11.		Binings Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Binings Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	80.000.000	0	-	2	30.000.000	2	39.474.380	0	825.304	1	9.672.956	2	19.160.770	0	1.650.608	3	31.309.638	150,00	79,32	3	31.309.638	30	39,14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persentase	61	1.237.116.000	55	201.556.408	57	206.999.980	57	617.112.545	55	36.747.580	55	39.941.607	55	32.396.620	57	126.516.614	55	235.602.421	96,49	38,18	110	437.158.829	180	35,34	
2.07.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	5	32.000.000	1	24.864.500	1	3.000.000	1	35.490.000	1	6.986.000	0	7.214.250	0	7.214.250	1	9.619.000	1	30.953.500	100	87,44	2	55.818.000	40	174,43	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dididirikan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dididirikan	Paket	10	251.000.000	0	-	2	50.000.000	2	64.824.925	0	0	2	6.862.400	0	0	2	28.345.900	0	35.208.250	0	-	0	35.208.250	0	14,03	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Dididirikan	Paket	10	70.000.000	2	50.999.000	2	5.000.000	2	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50.999.000	20	72,73	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.07.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dididirikan	Paket	5	42.000.000	1	2.394.000	1	12.000.000	1	24.600.000	0	0	0	0	1	2.371.500	0	2.075.000	1	4.446.500	100	18,08	2	6.890.500	40	16,29	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Dididirikan	Paket	10	240.000.000	2	15.194.500	2	44.999.980	2	68.099.940	0	0	1	2.670.400	0	0	0	6.983.200	1	9.653.600	50	14,03	3	24.838.100	30	10,15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralatan Perundang-Undangan yang Dididirikan	Dokumen	25	35.000.000	3	5.876.000	5	7.000.000	5	7.000.000	0	0	0	3	3.825.000	3	2.025.000	6	5.898.000	129	83,57	11	18.938.000	44	31,27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.07.01.2.06.09.		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150	525.116.000	10	103.128.408	12	75.000.000	12	406.587.980	3	29.891.580	3	23.194.507	3	18.985.879	3	77.468.514	12	149.480.471	100,00	36,77	22	252.618.879	14	40,15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.07.		Penyediaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana pemungut urusan perkantoran	Persentase	70	1.75.000.000	0	-	55	42.000.000	55	200.903.730	0	3.306.292	55	51.811.848	55	90.109.438	56,27	44.910.584	56,27	190.138.162	102,31	94,64	56,27	190.138.162	80	108,65	
2.07.01.2.07.01.		Pengadaan Mobil	Jumlah Paket Mobil yang disediakan	Paket	8	40.000.000	0	-	2	10.000.000	2	43.403.730	0	3.306.292	0	4.959.438	0	4.959.438	2	26.512.594	2	39.737.252	100	93,73	2	39.737.252	25	99,34	
2.07.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	16	125.000.000	0	-	4	32.000.000	4	158.500.000	0	0	2	46.852.440	1	85.150.000	2	18.398.000	5	150.400.410	125	94,89	5	150.400.410	31	111,41	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.08.		Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana pemungut urusan perkantoran	Persentase	100	1.485.000.000	100	408.127.235	100	256.000.000	100	509.656.536	80	108.665.275	85	120.072.232	90	113.349.473	100	127.625.613	100	469.712.593	100	93,16	200	869.839.828	200	58,56	
2.07.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	46.000.000	0	-	12	5.000.000	12	40.000.000	3	6.550.167	3	8.281.500	3	8.689.500	3	14.002.000	12	37.511.167	100	93,78	12	37.511.167	20	81,55	
2.07.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya A dan Unit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya A dan Unit	Laporan	2	344.000.000	2	58.307.669	2	51.000.000	2	95.000.000	2	15.057.940	2	14.245.564	2	14.602.805	2	17.536.581	2	61.444.880	100	64,68	4	119.752.589	200	34,81	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	60	1.095.000.000	12	341.819.536	12	200.000.000	12	374.656.536	3	87.057.168	3	97.557.168	3	90.057.168	3	90.085.032	12	370.756.536	100	96,96	24	712.576.072	40	65,08	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana pemungut urusan	Persentase	60	841.608.000	58,25	221.267.761	58,25	126.500.000	59,30	161.614.096	59,30	4.794.030	59,80	12.312.152	59,80	7.890.000	59,80	48.325.868	59,80	73.322.050	99,18	45,37	99,18	294.589.811	99,18	35,00	

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025

No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Tahun Rencana PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode rencana PD)	Realisasi capaian kinerja Rencana PD sampai dengan Tahun 2022	Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang direvisi	Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang direvisi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023	Realisasi Kinerja Rencana PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Rencana PD s/d Tahun 2023	Perangkat Daerah				
								I				II				III				IV				12=8+9+10+11			13=12/3x100				14=6+12		15=14/3x100	
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		K	RP			K	RP		
1	2	3	4	4A	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24										
2.07.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan diayakikan Pajak dan	Unit	11	100.000.000	11	54.271.136	11	20.000.000	11	100.000.000	1	4.794.030	11	9.562.252	11	4.390.000	11	35.950.888	11	54.857.050	100,00	54,34	22	108.968.186	200	108,97	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
2.07.01.2.09.06.		Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	30	109.000.000	0	-	10	33.000.000	10	55.950.000	0	0	2	2.750.000	5	3.500.000	3	12.375.000	10	18.625.000	100,00	33,29	10	18.625.000	33	11,82	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
2.07.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibangun	Unit	2	187.000.000	0	-	2	23.500.000	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
2.07.03.		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persentase	0,24	2.283.356.000	0,26	11.670.000	0,12	326.356.020	0,12	500.000.000	0	2.552.500	0	16.383.500	0,11	19.530.678	1,12	408.716.769	1,12	447.183.447	99,01	89,44	458.853.447	99,01	20,10							
2.07.03.2.01.-		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Tulisan Bersertifikat Kompetensi	Persentase	83	2.283.356.000	80,87	11.670.000	75	326.356.020	75	500.000.000	0	2.552.500	0	16.383.500	0	19.530.678	74,10	408.716.769	74,10	447.183.447	99	89,44	458.853.447	99,01	20,10							
2.07.03.2.01.01.		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kelas Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahunan	Orang	80	1.433.356.000	0	11.670.000	16	396.306.020	16	500.000.000	0	2.352.500	0	16.381.500	0	19.530.678	16	408.716.769	16	447.183.447	100	89,44	16	458.853.447	20	32,01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
2.07.04.		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persentase	100	1.080.000.000	6,56	12.165.258	92	210.000.000	92	200.000.000	0	1.940.750	0	5.822.250	0	13.828.450	67,35	149.870.957	67,35	171.462.407	73,20	85,73	74	183.627.665	74	17,00						
2.07.04.2.01.-		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lulusan Kerja yang Tersedia di Wilayah Kabupaten/Kota	Lulusan Kerja	9	1.080.000.000	3	12.165.258	6	210.000.000	6	200.000.000	0	1.940.750	0	5.822.250	1	13.828.450	5	149.870.957	6	171.462.407	100,00	85,73	9	183.627.665	100	12,00						
2.07.04.2.01.05.		Perkuliahan Keterampilan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Dibebaskan Melalui program Perkuliahan Keterampilan Kerja	Orang	100	250.000.000	10	12.165.258	20	50.000.000	20	200.000.000	0	1.940.750	0	5.822.250	0	13.828.450	32	149.870.957	32	171.462.407	100	85,73	42	183.627.665	42	73,45	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
2.07.05.		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	Persentase	0	1.350.000.000	5	101.077.414	3	170.000.000	3	171.453.000	0	12.004.313	15,79	6.241.539	17,50	5.041.539	26,92	52.984.139	26,92	76.271.530	89,73	44,49	32	177.348.944	532	13,14						
2.07.05.2.02.		Pengembangan dan Persepsi Pelaksanaan Persediaan Hubungan Industrial, Mekanik Kerja dan Penetapan Persediaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perkara yang diselesaikan	Persentase	70	1.350.000.000	0	101.077.414	55	170.000.000	55	171.453.000	0	12.004.313	0	6.241.539	0,00	5.041.539	0,00	52.984.139	0	76.271.530	0	44,49	0	177.348.944	0	13,14						
2.07.05.2.02.01.		Pengembangan Persepsi Hubungan Industrial, Mekanik Kerja, dan Penetapan Persediaan yang Berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persepsi yang Disetujui	Perkara	5	720.000.000	0	62.456.314	1	90.000.000	1	130.131.000	0	1.880.513	0	6.241.539	0	5.041.539	0	45.348.139	0	58.311.530	0	44,49	0	140.768.244	0	19,50	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
2.07.05.2.02.05.		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	3250	630.000.000	4.116	18.621.100	3200	80.000.000	3200	41.322.000	0	10.323.000	2,03	0	1.494	0	472	7.635.800	3.907	17.959.600	122,08	43,48	8.023	36.580.700	247	5,81	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
		URUSAN TRANSMIGRASI																																
3.32.02.		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	Persentase	100	1.310.000.000	100	122.982.432	100	210.000.000	100	80.018.000	100	-	100	3.200.720	100	10.430.340	100	20.160.740	100	33.791.800	100	42,23	100	156.774.232	100	11,97	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
3.32.02.2.01.-		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	Kawasan	1	1.310.000.000	1	122.982.432	1	210.000.000	1	80.018.000	1	-	1	3.200.720	1	10.430.340	1	20.160.740	1	33.791.800	100	42,23	2	156.774.232	200	11,97	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
3.32.02.2.01.04.		Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen	5	1.310.000.000	1	122.982.432	1	210.000.000	1	80.018.000	0	0	0	3.200.720	0	10.430.340	1	20.160.740	1	33.791.800	100	42,23	2	156.774.232	40	11,97	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
3.32.04.		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan	Persentase	100	820.000.000	100	21.963.864	100	120.000.000	100	138.529.000	0	-	0	7.506.844	0	8.823.000	0	38.360.855	0	54.689.899	0	39,48	100	76.653.763	100	9,35	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
3.32.04.2.01.		Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Konsolidasi	Jumlah Satuan Kawasan Pemukiman yang dikembangkan	SMP	2	820.000.000	2	21.963.864	2	120.000.000	2	138.529.000	0	-	0	7.506.844	2	8.823.000	2	38.360.855	2	54.689.899	100	39,48	4	76.653.763	200	9,35	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
3.32.04.2.01.01.		Pengadaan SDR dalam rangka Kemendirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigrasi yang Didata	Kepala Keluarga	120	240.000.000	0	-	35	70.000.000	35	67.983.000	0	0	0	6.156.844	0	0	50	32.500.075	50	38.716.899	142,86	56,96	6	38.716.899	5	16,13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
3.32.04.2.01.02.		Pengadaan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kebutuhan dalam rangka Kemendirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Pemukiman yang dikembangkan dalam rangka Pengadaan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kebutuhan	SP	6	580.000.000	6	21.963.864	6	50.000.000	6	70.546.000	0	0	0	1.350.000	5	8.823.000	1	5.800.000	6	15.973.000	100,00	22,64	6	37.936.864	100	6,54	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
01 - 02.		BALAI LATIHAN KERJA																																
2.07.01.-		PROGRAM PERENCANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang	Persentase	90	219.000.000	80	133.999.018	85	47.000.000	80	195.871.709	85	13.536.702	85	35.833.509	85	21.441.503	85	79.747.735	85	149.749.448	100,75	70,40	283.748.466	128,57								
2.07.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat	Persentase	61	103.000.000	55	57.823.681	75	23.000.000	57	127.513.042	55	2.926.702	55	17.533.509	55	9.141.502	57	57.171.243	57	87.319.456	100,0	68,40	112,0	144.343.137	184	148,1						

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025

Kode	Sas an	Uraian/Bidang Urutan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang direalisasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang direalisasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah		
											I		II		III		IV												
					1	2	3	4	4A	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12	
					K	RP	K	RP	K	RP Renja	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			
2.02.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	5	17.000.000	1	23.779.124	1	3.000.000	1	17.419.732	1	2.509.702	0	7.102.000	0	3.167.502	0	4.221.536	1	17.419.542	100,00	100,00	2,00	41.198.916	40,00	242,35	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.02.01.2.06.02.		Penyediaan Perakitan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perakitan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	5	21.000.000	0	-	1	5.000.000	1	5.500.000	0	-	0	-	1	1.438.000	1	1.438.000	100,00	26,15	1,00	1.438.000	30,00	6,83	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
2.02.01.2.06.03.		Penyediaan Perakitan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perakitan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	20.000.000	1	940.000	1	5.000.000	1	2.500.000	0	-	0	-	-	0	-	-	0,00	1,00	940.000	20,00	4,29	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
2.02.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	5.000.000	0	-	1	2.000.000	1	3.000.000	0	-	0	-	1	2.979.300	1	2.979.300	100,00	90,31	1,00	2.979.300	30,00	50,59	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
2.02.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Paket	10	15.000.000	1	6.550.000	2	3.000.000	1	6.750.000	0	-	0	-	1	1.500.000	1	1.500.000	100,00	22,22	2,00	6.050.000	20,00	53,67	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
2.02.01.2.06.06.		Penyediaan Laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	25.000.000	8	25.854.307	5	5.000.000	5	92.343.110	1	-	3	10.431.507	3	5.974.000	3	47.577.107	10	63.982.614	100,00	69,29	18,00	89.836.921	72,00	350,35	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.02.01.2.06.06.		Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	Persentase	100	116.000.000	80	76.975.337	100	24.000.000	100	68.358.667	80	10.600.000	85	17.500.000	90	12.300.000	100	22.029.992	100,00	62.429.992	100,0	91,33	180,0	139.405.329	180	126,7	
2.02.01.2.06.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	40	21.000.000	12	13.325.337	12	5.000.000	12	9.458.667	3	-	3	2.000.000	3	-	3	5.629.992	12	7.629.992	100,00	80,67	24,00	21.005.329	30,00	100,0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.02.01.2.06.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	90	95.000.000	12	63.600.000	12	19.000.000	12	58.900.000	3	10.600.000	3	15.500.000	3	12.300.000	3	16.400.000	12	54.800.000	100,00	81,04	24,00	118.400.000	40,00	124,83	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna pada tahun 2023 secara keseluruhan relatif baik. Hal ini terlihat dari sebanyak 4 indikator program yang ditargetkan dalam Renja tahun 2023, hanya 1 program yang capaian nya masih dibawah target. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian target kinerja pada urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi tergolong baik.

Secara rinci capaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna disajikan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Kinerja Akhir Renstra (2026)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Renstra Ke-1 (2022)			Target dan Realisasi Kinerja Tahun Renstra Ke-2 (2023)		
					Target Kinerja Renja tahun 2022	Realisasi Kinerja Renja tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022 (%)	Target Kinerja Renja tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	Predikat / Nilai Akuntabilitas	Nilai Laporan LKjIP	81,87	81,92	81,88	81,65	99,72	81,89	71,05	86,76
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,04	0,24	0,08	0,26	325	0,12	1,02	392

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Kinerja Akhir Renstra (2026)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Renstra Ke-5 (2022)			Target dan Realisasi Kinerja Tahun Renstra Ke-1 (2023)		
					Target Kinerja Renja tahun 2022	Realisasi Kinerja Renja tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022 (%)	Target Kinerja Renja tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang di Tempatkan	Persen	90	100	90	6,56	7,29	92	67,35	73,20
Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	Persen	0	6	2	5	250	3	26,92	897,33
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi yang Ditetapkan	Persen	-	100	100	100	100	100	100	100
Program Pengembangann Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan	Persen	-	100	100	100	100	100	100	100

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Sebelum dirumuskan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

- a. Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :
 - 1) Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar
 - 2) Sarana prasarana penyelenggaraan pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja
 - 3) Sistem informasi ketenagakerjaan belum memadai
 - 4) Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintahan desa tentang program transmigrasi
 - 5) Belum adanya data penunjang yang dapat digunakan sebagai dasar usulan untuk pengembangan kawasan transmigrasi.
- b. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki tantangan untuk mendorong seluruh perangkat daerah dalam memecahkan isu strategis di Kabupaten Natuna, meliputi :

 - a) Masih banyaknya jumlah pengangguran yang memiliki pendidikan formal (SMU/SMK/Perguruan Tinggi) yang belum memiliki kualifikasi kompetensi yang diharapkan oleh pasar tenaga kerja/dunia usaha.
 - b) Terbatasnya anggaran daerah untuk pelatihan ketenagakerjaan.
 - c) Terbatasnya peluang kesempatan kerja yang tersedia di Kabupaten Natuna.
 - d) Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki BLK sehingga tidak berkembangnya jenis pelatihan yang dilaksanakan.
 - e) Kurangnya Sumber Daya Manusia khususnya Tenaga Instruktur yang

memiliki sertifikat kompetensi.

- f) Minimnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dasar penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja.
- g) Minimnya SDM yang menangani ketransmigrasian

c. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

- a) Minat/motivasi pencari kerja untuk mengikuti pelatihan yang dilaksanakan di BLK Natuna maupun diselenggarakan di BLK luar.
- b) Adanya dukungan anggaran pusat untuk percepatan pencapaian pelayanan bidang ketenagakerjaan.
- c) Terdapat beberapa perusahaan/pengusaha lokal yang mau bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja untuk mempekerjakan pencari kerja yang telah bersertifikat kompetensi untuk diangkat sebagai karyawan pada tempat usaha mereka.
- d) Kondisi keamanan yang relative stabil sehingga tidak ada demo atau kasus yang melibatkan pekerja-pengusaha.
- e) Dukungan ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk pengembangan pelayanan.
- f) Terbukanya peluang dan kesempatan masyarakat ekonomi lemah (kurang sejahtera) untuk merubah dan memperbaiki taraf hidup;
- g) Dana yang tersedia lewat APBN dan lembaga ekonomi yang lain;
- h) Adanya otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab;
- i) Adanya koordinasi lintas sektoral/dinas, K/L terkait;
- j) Adanya jaringan kemitraan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah, Antar Pemerintah Daerah, Antar lintas sektoral dengan masyarakat, lembaga ekonomi, mitra usaha (investor) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM/Organisasi sosial).;
- k) Meningkatnya kepedulian stakeholder terhadap penyelenggaraan bidang ketransmigrasian;

Beberapa isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing dalam menghadapi pasar kerja dan iklim hubungan industrial yang harmonis dan kondusif.
2. Perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat dan desa eks. satuan

permukiman transmigrasi dan sekitarnya di kawasan transmigrasi.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Natuna tahun 2025, secara umum telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terlihat dari rumusan program dan kegiatan dalam rancangan awal RKPD sudah selaras dan anggarannya telah sesuai dengan kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai strategi dalam pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Pada tahun 2025 pemerintah mempunyai tujuh agenda pembangunan ebagaimana tercantum pada gambar berikut ini:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Isu Strategis nasional yang akan ditangani pada tahun 2025 adalah:

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Hal Kesehatan dan Pendidikan
3. Penanggulangan Pengangguran Yang Disertai Decent Job
4. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha
5. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan Dalam Rangka Mendorong Produktivitas

6. Ekonomi Hijau

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 adalah: **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan 7 Prioritas Nasional. Tujuh PN tahun 2025 yang merupakan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2025, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan 2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Dalam lima tahun mendatang (2020-2024), sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu "Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera",

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Sasaran dari prioritas Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, meliputi:

- a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan
- b. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk
- c. Terpenuhinya layanan dasar
- d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda
- e. Terwujudnya pengentasan kemiskinan
- f. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan memiliki sasaran sebagai berikut:

- a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya
- b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan
- c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial
- d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat
- e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa
- f. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sasaran pembangunan dari prioritas ini, yaitu:

- a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar
- b. Meningkatnya konektivitas wilayah
- c. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan
- d. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien
- e. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Prioritas nasional keenam ini memiliki beberapa sasaran, yaitu:

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
- b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
- c. Pembangunan Rendah Karbon

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sasaran dari prioritas Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik, yaitu:

- a. Konsolidasi Demokrasi
- b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
- c. Penegakan Hukum Nasional yang Mantap
- d. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
- e. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Arah Kebijakan pembangunan nasional tahun 2025, meliputi:

- a. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan
- b. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job
- c. Mendorong pemulihan dunia usaha
- d. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
- e. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
- f. Percepatan Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
- g. pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi
- h. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

3.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Pada tahun 2025 prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau diarahkan pada optimalisasi potensi perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur wilayah dan pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya.

3.3. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025

Pada tahun 2025 ini fokus pembangunan Kabupaten Natuna berdasarkan isu strategis daerah, yaitu:

1. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter budaya melayu
2. Penanganan pandemi akibat covid-19
3. Kemandirian masyarakat ekonomi berbasis masyarakat, terutama di sektor kemaritiman dan pariwisata
4. Akselerasi pembangunan wilayah Natuna sebagai kawasan strategis perbatasan nasional
5. Peningkatan pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah
6. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi komunikasi
7. Penurunan kualitas lingkungan hidup
8. Implementasi Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik)

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa depan dengan lebih mengoperasionalkan pelaksanaan misi. Tujuan juga mencerminkan adanya prioritas program dan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui perumusan tujuan diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai ke depan atau mengarahkan perumusan sasaran tahunan, arah kebijaksanaan, program serta kegiatan. Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna konsisten dengan tugas pokok dan fungsinya secara kolektif menggambarkan arah strategisnya dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan demikian Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 tahun guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 tahun ke depan. Indikator kinerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran.

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistim pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator kinerja masukan dan keluaran dapat dinilai sebelum kegiatan selesai, karena masukan adalah semua bahan termasuk orang, material, alat, dan uang yang digunakan dalam proses untuk menghasilkan output. Sedangkan keluaran adalah suatu wujud atau keadaan yang diciptakan melalui proses yang mempunyai nilai tambah untuk dimanfaatkan.

Untuk indikator hasil, manfaat, dan dampak akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan. Hasil adalah kegunaan langsung dari output atau manfaat suatu output ditinjau dari maksud atau sasaran output tersebut dihasilkan, manfaat adalah kegunaan lebih lanjut yang diharapkan dikaitkan dengan tujuan jangka menengah. Sedangkan dampak adalah kegunaan akhir dari output yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang atau tujuan akhir.

Penetapan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna untuk periode Renstra 2021-2026, beserta indikator capaiannya diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai.

Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna adalah Meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja melalui peningkatan keterampilan bagi pencari kerja. Sedangkan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna adalah Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja.

Tabel tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

MISI 2 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya Angka Partisipasi Angkatan Kerja Melalui Peningkatan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	Meningkatnya Angka Partisipasi Angkatan Kerja Melalui Peningkatan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Terwujudnya Penyelesaian Permasalahan Keteransmigrasian di Kawasan Transmigrasi Kabupaten Natuna	Persentase Kawasan Eks Transmigrasi yang difasilitasi Penyelesaiannya	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Keteransmigrasian di Kawasan Transmigrasi Kabupaten Natuna	Persentase Penyelesaian Permasalahan keteransmigrasian yang diselesaikan
MISI 6 : Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (SMART BUREAUCRACY)			
Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran beserta Program Tahun 2025
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Indikator Sasaran 2025	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2025
1. Meningkatnya Angka Partisipasi Angkatan Kerja Melalui Peningkatan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Meningkatnya Angka Partisipasi Angkatan Kerja Melalui Peningkatan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	72,37	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	0,20
					Program Pempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Persen	96
					Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	Persen	5
2. Terwujudnya Penyelesaian Permasalahan Keteransmigrasian di Kawasan Transmigrasi Kabupaten Natuna	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Keteransmigrasian di Kawasan Transmigrasi Kabupaten Natuna	Persentase Penyelesaian Permasalahan keteransmigrasian yang diselesaikan	%	70	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi yang Ditetapkan	Persen	100
					Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan	Persen	100
3. Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	Nilai	81,91	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	81,91
4. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,49	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	90

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

- a. Mengarah pada urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2021-2026,
- b. Mengarahkan pada penanganan permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna sebagaimana tertuang dalam Renstra tahun 2021-2026.

Secara rinci program dan kegiatan serta Pagu Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna tahun 2025 tertuang dalam Tabel berikut ini (Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026).

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja guna mendukung pencapaian visi Kabupaten Natuna tahun 2021-2026.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pjabat struktural di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar mengawal pelaksanaan Renja tahun 2025 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2025 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2025.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan program dan kegiatan Renja tahun 2025 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Kepala Dinas dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025 guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik.

Dengan adanya Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan pada urusan ketenagakerjaan dan urusan transmigrasi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan perangkat daerah yang lain. Semoga dengan tersusunnya Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025, mendorong peningkatan kualitas kinerja dapat perannya sebagai perangkat daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan dan urusan transmigrasi. Selain itu, diharapkan Rencana Kerja tahun 2025 ini mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan

dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026.

Ranai, 5 Agustus 2024



RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. NATUNA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						8.145.886.020,00							8.290.886.020,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.845.886.020,00							7.865.886.020,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						7.845.886.020,00							7.865.886.020,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	-			81.91 Nilai	5.979.786.020,00						-	5.999.786.020,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	40.000.000,00			-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-	-	60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	40.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Tepat Waktu	4.700.030.000,00			-	-	-	-	4.700.030.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	4.700.030.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.700.030.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			95 Persen	15.000.000,00			-	-	-	-	15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	15.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	-			60 Persen	257.756.020,00			-	-	-	-	257.756.020,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	131.756.020,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		131.756.020,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	-			65 Persen	368.000.000,00			-	-	-	-	368.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	272.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		272.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	85.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		85.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	-			100 Persen	296.000.000,00			-	-	-	-	296.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	91.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		91.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	-			59.50 Persen	303.000.000,00			-	-	-	-	303.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	33.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	-			0.20 Persen	966.100.000,00						-	966.100.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Lulusan Bersertifikat Kompetensi	-			80 Persen	916.100.000,00			-	-	-	-	916.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				16 Orang	706.100.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		706.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja														
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				1 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				5 Unit	160.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		160.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK yang Memiliki Perizinan	-			50 Persen	50.000.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi														
			Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi				1 Perizinan	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN	-			96 Persen	500.000.000,00						-	500.000.000,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia di Wilayah Kabupaten/Kota	-			8 Lowongan Kerja	280.000.000,00			-	-	-	-	280.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi				2 Orang	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				10 Orang	30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				20 Orang	130.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		130.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD				1 Orang	20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				20 Orang	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	-			10 Orang	190.000.000,00			-	-	-	-	190.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				1 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				1 Orang	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				5 Orang	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						300.000.000,00							425.000.000,00	
1.	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE KAWASAN TRANSMIGRASI YANG DITETAPKAN	-			100 PERSEN	100.000.000,00						-	225.000.000,00	
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi Penetapannya	-			1 Kawasan	100.000.000,00			-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-	-	225.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.2.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi														
			Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah 1. Peningka tan Ekonomi Daerah	-		225.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE KAWASAN TRANSMIGRASI YANG DIKEMBANGKAN	-			100 PERSEN	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Kawasan Permukiman yang Difasilitasi Pengembangannya	-			2 SKP	200.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman														
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				50 Kepala Keluarga	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman														
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				6 Satuan Permukiman	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	J U M L A H							8.145.886.020,00							8.290.886.020,00	

Kabupaten natuna, 05 Agustus 2024
Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Natuna


INDRA JONI, S.Sos
Nip. 19700903 199201 1 001

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
UPTD BALAI LATIHAN KERJA KAB. NATUNA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPTD BALAI LATIHAN KERJA						52.000.000,00							52.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						52.000.000,00							52.000.000,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						52.000.000,00							52.000.000,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	-			90 PERSEN	52.000.000,00						-	52.000.000,00	
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	18.000.000,00			-	-	-	-	18.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	24.000.000,00			-	-	-	-	24.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	19.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		19.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	J U M L A H							52.000.000,00							52.000.000,00	

Kabupaten natuna, 05 Agustus 2024
Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Natuna



INDRA JONI, S.Sos
Nip. 19700903 199201 1 001